

Masing-masing Capres-Cawapres Dijaga 74 Anggota Polisi 24 Jam, Ini Rinciannya

JAKARTA (IM) - Setiap calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mendapatkan tim pengawal yang terdiri dari 74 personel anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pengawalan yang akan diberikan kepada capres dan cawapres itu, merupakan bagian dari satuan tugas (Satgas) dalam Operasi Mantap Brata yang mengamankan Pemilu 2024.

"Operasi Mantap Brata di tingkat pusat ada 9 satgas, salah satunya adalah Satgas Pengamanan Capres dan Cawapres," kata Ramadhan kepada wartawan dikutip pada Rabu (15/11).

"Satgas Pam Capres Cawapres terdiri dari beberapa subsatgas yang memiliki tugas masing-masing," katanya.

Ramadhan menjelaskan masing-masing calon disiapkan dua tim yang mana

1 tim berjumlah 37 orang. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 74 personel.

Ramadhan merincikan bahwa dalam satu tim akan terdiri sembilan personel yang bertugas sebagai asisten pribadi (spri) dan ajudan (ADC) serta perwira penghubung protokol (Pabungkol).

Pengamanan dan pengawalan termasuk tenaga medis sebanyak 21 personel. Kemudian pengawal lalu lintas berjumlah 7 personel yang di antaranya 2 motoris dan 2 sedan patwal.

Sekadar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan nomor urut terhadap 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa (14/11).

Untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, kemudian pasangan Prabowo-Gibran mendapat nomor urut 2, serta pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3. • lus

Satreskrim Polres Jakpus Usut Dugaan Penipuan Tiket Konser Coldplay Rp1,3 M

JAKARTA (IM) - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat bakal menyelidiki dugaan penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay, yang digelar di GBK, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyelidikan tersebut terkait adanya laporan penipuan yang dialami beberapa korban.

"Saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/11).

Saat ini jajaran Satreskrim Polres Jakpus masih mendalami modus penipuan tersebut. Termasuk, menelaah kerugian yang dialami sejumlah korban. "Keterangan lengkap tentang jumlah korban dan kerugian akan disampaikan menyusul," paparnya.

Beberapa korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay juga telah membuat laporan polisi.

"Tadi malam ada yang melaporkan penipuan tiket ke Polres Jakpus. Tersangka (ditangkap) akan disampaikan menyusul," ujarnya.

Sebelumnya, Polisi menerima laporan terhadap beberapa laporan yang masuk karena merasa tertipu akibat konser band asal Inggris, Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Rabu (15/11/2023).

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta

Pusat AKP Dwi Hardono, membenarkan adanya korban penipuan tiket konser Coldplay yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Sampai sejauh ini baru beberapa korban yang mendatangi dan membuat LP (laporan polisi) ke Polres Metro Jakarta Pusat. Baru korban - korban (melapor)," kata Dwi saat dihubungi, Rabu (15/11).

3.906 Personel TNI dan Polri

Aparat gabungan Polri dan TNI telah menyiapkan sebanyak 3.906 personel untuk pengamanan jalannya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/11).

"3.906 personel (amankan konser Coldplay di Jakarta)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan.

Trunoyudo mengatakan 3.906 personel itu gabung dari anggota Polda Metro, Polres, hingga BKO dari TNI AD dan polda DKI Jakarta. Rinciannya yaitu 2.626 personel Polda Metro, 299 personel dari Polres, 981 personel BKO dari TNI AD hingga Polda DKI.

Dia meminta semua pihak, baik penonton konser maupun masyarakat Jakarta secara keseluruhan agar menjaga ketertiban dan keamanan selama konser Coldplay berlangsung.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara umum," ujar Trunoyudo. • lus

Pelaku Tawuran di Bogor Merasa Bangga Bacok Korban hingga Tewas

BOGOR (IM) - Polisi menangkap 2 pelaku tawuran antar kelompok di wilayah Kota Bogor. Dalam tawuran tersebut, satu orang meninggal dunia dengan luka bacok senjata tajam di bagian kepala.

"Diamankan dua tersangka RR (19) yang melakukan pembacokan, dan MR (22) yang penyedia senjata tajam," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Rabu (15/11).

Pembacokan terhadap korban berinisial MHS (22) terjadi pada Minggu (12/11) dini hari. Sebelumnya, antara kelompok pelaku dengan kelompok korban perjanjian untuk tawuran.

"Dari 2 kelompok ada yang kalah jumlah, terdesak mundur, dilakukan pembacokan (korban MHS 22 tahun). Salah satu pihak melakukan penganiayaan kepada korban terkena di

bagian kepala, kehabisan darah dan meninggal dunia," jelasnya.

Adapun motif dalam aksi tawuran ini hanya karena bangga dan dianggap hebat.

Atas perbuatannya, tersangka RR dijerat Pasal 170 Ayat 2, Pasal 351 Ayat 2 dan Pasal dengan ancaman 12 tahun penjara.

"Yang menyediakan senjata tajam kita terapkan UU Darurat ancaman 12 tahun penjara," ungkapnya.

Saat ini, polisi juga masih melakukan pendalaman ada tidaknya tersangka lain yang terlibat. Termasuk mencari tahu anggota kelompok-kelompok tersebut untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.

"Yang terlibat pidana diproses, yang tidak bisa kita bina. Sehingga tidak terlanjur jauh terpengaruh dendam, pengaruh senior dan lain-lain," katanya. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANT



RAKER POLRI DENGAN KOMISI III DPR

Kabaharkam Polri Memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/11). Raker tersebut membahas terkait pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024 melalui Operasi Mantap Brata yang digelar secara serentak dari tingkat Polres sampai Mabes Polri.

Tiga Operasi Besar Polri, Mulai Pendaftaran Hingga Pengucapan Sumpah Presiden-Wapres

Jajaran Polri dijamin netralitas pada Pemilu 2024. Jika ada anggota kepolisian melanggar hal ini akan ditindak tegas.

JAKARTA (IM) - Kabaharkam Komjen Mohammad Fadil Imran mengungkapkan tiga operasi yang akan dilakukan jajaran kepolisian untuk mengamankan Pemilu 2024. Operasi dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.

"Adapun 3 pengamanan pemilu yang dilaksanakn polri, pertama adalah operasi nusantara cooling system," kata Fadil saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Operasi nusantara cooling system ditujukan untuk

mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

"Kedua operasi Mantap Brata, operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu tahun 2024. Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi Aman Nusa 1, 2, dan 3," terang Fadil.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, operasi kontingensi ini bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontijensi dan disebabkan oleh konflik sosial

bencana alam dan terorisme.

Dalam melaksanakan operasi Mantap Brata tersebut, kata Fadil, Polri juga melaksanakan operasi cooling system, di mana keberhasilan operasi ini tergantung dari kepemimpinan yang kuat dan adaptif untuk jalankan strategi berbagai penentu keberhasilan.

Operasi Nusantara Cooling system juga dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya untuk menyelesaikan operasi Mantap Brata yang dipimpin Wakabareskrim Polri dengan kepedulian untuk jamin penyelenggaraan pemilu agar suasana pemilu tetap aman, damai dan sejuk khususnya di ruang siber, dimana sering terjadi disinformasi propaganda dan black campaign.

"Kegiatan operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung dengan kekuatan Polri di

mana 2/3 kekuatan dikerahkan, sedangkan 1/3 kekuatan polri digunakan untuk laksanakan kegiatan rutin kepolisian," katanya.

Jamin Netralitas

Fadil dalam kesempatan itu juga mengatakan, Polri telah menerbitkan Surat Telegram kepada seluruh jajarannya agar netral pada Pemilu 2024.

"Isu netralitas, merupakan isu yang mengemuka dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu, Polri telah mengemukakan petunjuk dan arahan pada jajaran," kata Fadil.

Adapun arahan netralitas itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor 2407/X/2023. Fadil menjelaskan, surat itu ditujukan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri yang memilih untuk berpolitik praktis.

"Bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri, untuk menjaga netralitas dalam

pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.

Sejatinya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan sikap netralitas institusi Polri dalam tahapan Pemilu 2024. Hal itu dilakukan guna menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman.

Apabila nantinya ditemukan ada pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral, pihaknya tidak segan-segan untuk memproses oknum tersebut.

"Kalau ada pertanyaan kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor, tentu kita akan proses," kata Listyo Sigit, Selasa (14/11).

Mantan Kabareskrim Polri itu meminta masyarakat melapor apabila ditemukan pelanggaran netralitas dengan membawa bukti yang cukup, bukan hanya sekadar isu belaka.

"Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup," ujarnya.

• lus

Direktur Gratifikasi KPK Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pemasaran Terhadap SYL

JAKARTA (IM) - Polisi memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan pemasaran pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi.

"Ada satu pemeriksaan saksi pegawai KPK RI di Dittipidkor Bareskrim dan satu pemeriksaan saksi di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (15/11).

Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan, saksi yang diperiksa di Bareskrim Polri ialah Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmiyaya.

"Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmiyaya, Limpo (SYL)." ujarnya.

Kasus dugaan pemasaran terhadap SYL tersebut diadakan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023.

Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemasaran pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian.

Pihak kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Jumat (6/10).

Puluhan saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Ketua KPK Firlil Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin

Limpo (SYL).

Selain itu, ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Firlil Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Mochammad Jasim.

Pihak kepolisian juga sudah melakukan pengeledahan di rumah pribadi Firlil yang berlokasi di Bekasi dan rumah rehat Firlil di Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Beberapa dokumen turut disita penyidik dalam kasus tersebut.

Ade Safri mengatakan ada tiga dugaan tindak pidana yang ditemukan di antaranya pemasaran, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian. • lus

Modus Baru Pengekar, Narkoba Dimasukkan ke Dalam Kemasan Kripik dan Bungkus Rokok

YOGYAKARTA (IM) - Dit Res Narkoba Polda DIY mengungkap modus baru dalam peredaran narkotika dan obat berbahaya. Selain mengklamufase dengan bungkus makanan ringan, para pengekar juga menggunakan bungkus rokok untuk mengelabui petugas.

Kasubdit 3 Res Narkoba Polda DIY, AKBP Mardiyanto menuturkan, 9 orang tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan selama Oktober 2023. Mereka ditangkap dari 7 lokasi berbeda.

"Sembilan tersangka sebagian besar merupakan warga Jogja," katanya.

Para tersangka orang tersebut yakni, PT (34) warga Cempaka Putih Jakarta Pusat, AB alias TOMPEL (39) warga Mantrijeron Yogyakarta, RACN (23) warga Magelang Jawa Tengah yang tinggal di salah satu kos Miat Sleman. Kemudian, MMM (31) asal Wonosobo Jawa Tengah tinggal di salah satu kos Ngaglik Sleman.

SR alias OPIK (27) tinggal di salah satu kos Sinduadi Mlati Sleman, AK alias Apeng (46) warga Gamping Sleman, MT alias Jacky (37) asal Gamping Sleman, WP alias Bagio (41) warga Kasihan Bantul, HAP (26) warga Go-dean Sleman.

"Sejumlah barang bukti kami amankan. Terbanyak miras oplosan," ujarnya.

Barang bukti yang mereka amankan di antaranya adalah narkotika berupa ganja seberat 725,54 gram dan sabu seberat 2,47 gram, obat berbahaya jenis Trihexyphenidyl (pil sapi sebanyak 5.545 butir, dan miras oplosan total sebanyak 2.046.

Mardiyanto mengatakan, berbagai modus digunakan untuk mengelabui petugas. Untuk Ganja kering, para pengekar membungkus dengan lakban kecil-kecil kemudian dimasukkan dengan kardus berisi kripik tempe. Sementara untuk obat berbahaya dimasukkan ke dalam bungkus rokok.

"Itu hanya untuk mengelabui saja ya. Bukan membuat kripik tempe terus dikasih narkoba," ujarnya.

Sementara untuk miras oplosan produksinya memang berada di Yogyakarta. Di mana, produsen membeli bahan di toko resmi kemudian meracikannya dengan mengoplos berbagai bahan dan kemudian menjualnya dengan kemasan botol air mineral.

Untuk mengantarkan barang haram tersebut bisa dengan face to face atau pun secara online. Untuk ganja, biasanya dalam paket kecil dan kemudian ditempel di suatu tempat yang sudah dikoordinasikan.

"Jadi modusnya kian berkembang saja," ujarnya.

Para pelaku bakal dikenakan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 (Dua Belas) Tahun Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun.

Kemudian, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 (Empat) Tahun dan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • lus



POLDA METRO JAYA TANAM SEPULUH JUTA POHON

Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Karyoto melakukan penanaman pohon dalam program "Penanaman Sepuluh Juta Pohon bersama Polri" yang diselenggarakan Polda Metro Jaya dan Forkopimda DKI Jakarta di PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (15/11). Acara tersebut dilaksanakan serentak diseluruh Polda yang ada di Indonesia dan merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental.